KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR SE -08/PP/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA
PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-002/PP/2015
TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANDING
ATAU GUGATAN

FORMAT

DAFTAR ISIAN SURAT BANDING ATAU GUGATAN

1. Identitas Pemohon :
   a. Nama Pemohon : .....(1).....
   b. NPWP : .....(2).....
   c. Alamat sesuai NPWP : .....(3).....
   d. Alamat Korespondensi : .....(4).....
   e. Telepon : .....(5).....
   f. Faksimili : .....(6).....
   g. Surat Elektronik (*E-mail*) : .....(7).....
   h. Penanggung Jawab (*Contact Person*) : .....(8).....
2. Jenis Permohonan : ☐ Banding (9) ☐ Gugatan (10)
3. Jenis Sengketa/Jenis Pajak : .....(11).....
4. Surat Keputusan yang dibanding/digugat :
   a. Nomor : .....(12).....
   b. Tanggal : .....(13).....
5. Tahun Pajak : .....(14).....
6. Masa Pajak : .....(15).....
7. Surat Ketetapan Pajak :
   a. Nomor : .....(16).....
   b. Tanggal : .....(17).....
8. Dokumen-dokumen Pendukung :
   ☐ KEP/SPKTNP (18)
   ☐ Surat Keberatan (19)
   ☐ SKP/SPTNP/SPP/SPPBK (20)
   ☐ Bukti Bayar/SSP/SSPCP (21)
   ☐ Surat Kuasa (22)
   ☐ Akta Perusahaan (23)
   ☐ .....(24).....

....., ...(25).....

(26)

(.....(27).....)

KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT DAFTAR ISIAN PERMOHONAN BANDING ATAU GUGATAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mengajukan Surat Banding atau Surat Gugatan.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nilai Objek Pajak wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengajukan surat.

Nomor (3) : Diisi alamat Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mengajukan Surat Banding atau Surat Gugatan sesuai NPWP.

Nomor (4) : Diisi alamat korespondensi surat menyurat Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mengajukan surat.

Nomor (5) : Diisi telepon wajib pajak orang pribadi atau perusahaan yang mengajukan surat.

Nomor (6) : Faksimili wajib pajak orang pribadi atau perusahaan yang mengajukan Surat Banding atau Surat Gugatan.

Nomor (7) : Email/surat elekronik wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengajukan Surat Banding atau Surat Gugatan.

Nomor (8) : Diisi penanggung jawab atau orang yang berwenang dalam mengajukan Surat Banding atau Surat Gugatan.

Nomor (9) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila mengajukan permohonan banding.

Nomor (10) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila mengajukan permohonan gugatan.

Nomor (11) : Diisi Jenis Sengketa sesuai Surat Keputusan yang dibanding/digugat Misal PPh Pasal 25/29 Badan untuk Pajak Pusat atau Tarif untuk Sengketa Bea dan Cukai

Nomor (12) : Diisi Nomor Keputusan yang diajukan banding/gugatan

Nomor (13) : Diisi Tanggal Keputusan yang diajukan banding/gugatan

Nomor (14) : Diisi Tahun Pajak yang diajukan banding/gugatan

Nomor (15) : Diisi Masa Pajak yang diajukan banding/gugatan

Nomor (16) : Diisi Nomor Surat Ketetapan Pajak/SPTNP/SPP/SPPBK

Nomor (17) : Diisi Tanggal Surat Ketetapan Pajak/SPTNP/SPP/SPPBK

Nomor (18) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan KEP/ SPKTNP.

KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

Nomor (19) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan Surat Keberatan.

Nomor (20) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan SKP/ SPTNP/SPP.

Nomor (21) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan Bukti Bayar.

Nomor (22) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan Surat Kuasa.

Nomor (23) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan Akta Perusahaan.

Nomor (24) : Diisi dengan (√) atau (X) pada kotak apabila melampirkan pendukung lainnya.

Nomor (25) : Diisi tempat dan tanggal menyerahkan surat.

Nomor (26) : Diisi tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus yang mewakili Wajib Pajak Badan yang mengajukan Surat Banding atau Surat Gugatan.

Nomor (27) : Diisi nama Wajib Pajak atau pengurus yang mewakili Wajib Pajak Badan yang menyerahkan Surat Banding atau Surat Gugatan.

KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekretaris Pengadilan Pajak

Hana Sri Juni Kartika
196506111990102001